

**PENGUKURAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KOTA PADANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Diploma IV (D-IV)  
Politeknik Universitas Andalas

Oleh :

**ARFAN MUCHTAR**

**06096035**



**PROGRAM BEASISWA UNGGULAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIPLOMA IV AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**NOVEMBER 2009**



No. Alumni Universitas

Arfan Muchtar

No. Alumni Fakultas

a). Tempat/Tanggal Lahir: Batusangkar, 02 Januari 1969, b) Nama Orang Tua: Muchtar Karim dan Nuranah, c) Jurusan: Akuntansi, d) Program Studi: Akuntansi Pemerintahan, e) NBP: 06096035, f) Tanggal Lulus: 11 Agustus 2009, g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan, h) IPK: 3,27, i) Lama Studi: 32 bulan, j) Alamat: Jalan Raden Saleh No. 20 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

Pengukuran Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Padang

Tugas Akhir D.IV oleh Arfan Muchtar. Pembimbing 1. Zahara, SE. M. Ak. Ak. 2. Wiwik Andriani, SE Ak

## ABSTRAK


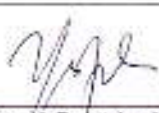


Sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Karena akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan tuntutan undang-undang sekaligus tuntutan publik, maka penelitian ini bertujuan untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMK Negeri di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner. Sampel penelitian terdiri dari SMK Negeri 1, SMK Negeri 3, SMK Negeri 5, dan SMK Negeri 6 Padang. Kuesioner diberikan kepada Kepala Sekolah, bandahara, guru, komite dan siswa. Masing-masing sekolah disebarkan kuesioner sebanyak 20 rangkap/sekolah. Aspek yang diuraikan dalam kuesioner adalah pengukuran akuntabilitas, pengukuran transparansi, peran sekolah dan komite sekolah, penyajian dan penggunaan informasi dalam laporan RAPBS, serta sarana dan proses pembukuan penyusunan RAPBS. Nilai rata-rata dari 4 sekolah: SMK Negeri 1 adalah 3,43 yang termasuk dalam kriteria sangat akuntabel dan sangat transparan, SMK Negeri 3 nilai rata-rata 2,91 termasuk kriteria akuntabel dan transparan, SMK Negeri 5 nilai rata-rata 2,54 termasuk kriteria akuntabel dan transparan, dan SMK Negeri 6 nilai rata-rata 2,37 termasuk kriteria akuntabel dan transparan. Secara keseluruhan nilai rata-rata 4 sampel adalah 2,9 yang termasuk dalam kriteria akuntabel dan transparan. Sehingga dapat disimpulkan pengelolaan keuangan sekolah ke 4 sekolah yang diteliti sudah akuntabel dan transparan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal :

11 Agustus 2009

Abstrak telah disetujui oleh penguji dan pendamping:

Penguji:

Tanda Tangan	1 	2 	3 	4 
Nama Terang	Dedy Jetris, SE. Ak	Yossi Septriani, SE, M.Acc, Ak	Eliyanora, SE, M.Ak.Ak	Zahara, SE, M.Ak.Ak

Mengetahui:

Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE, MM, Ak.  
Nama



Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumni

Nomor alumni Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
Nomor alumni Universitas:	Nama	Tanda Tangan

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan kepercayaan publik dalam bidang pendidikan sangat terkait dengan perlunya menciptakan proses dan manajemen yang menjamin bahwa sumber daya publik digunakan sebagaimana mestinya. Proses dan manajemen tersebut memerlukan pengelolaan yang baik (*good governance*). Dengan terciptanya *good governance*, diharapkan terwujud efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, guru sebagai profesi penyangga persyaratan tertentu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 39 (1) dan (2) dinyatakan bahwa: "tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan".

Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen tata kelola yang baik (*good governance*). Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua komponen yang saling mendukung dan melengkapi. Akuntabilitas pelayanan publik dimaksudkan sebagai kemampuan para pejabat publik memberikan penjelasan atas penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Transparansi pelayanan publik dimaksudkan sebagai ketersediaan akses bagi para pemangku kepentingan

(*stakeholders*) untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.

Dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 22-23 menempatkan akuntabilitas sebagai tujuan utama pelaporan keuangan organisasi pemerintah. Ini karena penyelenggara pelayanan serta pengendalian atas penggunaan sumberdaya keuangan merupakan aspek terpenting yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh organisasi pemerintah. Dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka membawa suatu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Dan dalam bidang keuangan, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara merupakan perwujudan reformasi di bidang keuangan negara.

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengatur pokok-pokok kewenangan pengelolaan keuangan daerah, perbendaharaan dan pemeriksaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan *omnibus regulation*, yakni peraturan perundangan yang memuat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 di daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah, yang disusun dengan berpedomankan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 memuat secara terperinci sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan APBD, serta akuntansi dan pelaporan.

Adanya reformasi di bidang keuangan sebagaimana dijelaskan, membawa perubahan pula dalam pengelolaan keuangan di bidang pendidikan. Khususnya untuk sekolah dasar dan menengah, pengelolaan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedomankan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keterlibatan masyarakat dalam dewan pendidikan dan komite sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah dimaksudkan agar tercipta situasi partisipatif serta mendorong transparansi dan akuntabilitas horizontal. Dewan pendidikan merupakan badan mandiri yang berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan kepala daerah dan DPRD dalam pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Komite sekolah merupakan badan mandiri yang berkedudukan sebagai mitra sejajar sekolah. Dengan struktur yang mandiri dan sejajar tersebut, dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan saran untuk memberikan umpan balik sekaligus pengawasan oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan atas penyelenggaraan pendidikan.

Komite sekolah menjadi lembaga formal yang menjadi tempat saluran bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah merupakan badan yang mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, yakni pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat.

## BAB LIMA

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Dari proses penyebaran kuesioner dan pengolahan data yang peneliti lakukan pada populasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Padang yang terdiri dari 10 sekolah, yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 4 sekolah yaitu SMK Negeri 1, SMK Negeri 3, SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 6 Padang didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah memperoleh nilai rata-rata 2,44 yang termasuk dalam kategori akuntabel.
2. Aspek transparansi pengelolaan keuangan sekolah memperoleh nilai rata-rata 2,88 yang termasuk dalam kriteria transparan.
3. Dilihat dari aspek peran sekolah dan komite sekolah dalam menjalankan tugasnya memperoleh nilai rata-rata 3,04 yang berarti telah berperan baik dalam membantu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah.
4. Penyajian dan penggunaan informasi dalam laporan APBS memperoleh nilai rata-rata 2,87 berarti masuk kriteria akuntabel dan transparan.
5. Sarana dan proses pembukuan dalam penyusunan RAPBS memperoleh skor rata-rata 3,31 berarti masuk kategori sangat akuntabel dan sangat transparan.

Dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan aspek penilaian SMK Negeri di Kota Padang mempunyai nilai 2,41 yang berarti masuk kategori akuntabel dan

transparan. Sehingga dapat disimpulkan secara rata-rata SMK Negeri di Kota Padang sudah mengelola keuangannya secara akuntabel dan transparan.

## **5.2 KETERBATASAN PENELITIAN**

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh beberapa hal. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan sampel, yakni jumlah sampel yang masih kecil. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian ini.
2. Kuesioner dalam penelitian ini masih sama dengan kuesioner Parwita (2008), tidak ada penambahan pertanyaan kecuali hanya menyesuaikan kekhususan sampel untuk pertanyaan tertentu. Kuesioner masih dapat dikembangkan dalam penilaian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah pada penelitian berikutnya.

## **5.3 SARAN**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Padang dengan mengambil sebanyak empat sekolah sebagai sampel yaitu SMK Negeri 1, SMK Negeri 3, SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 6 Padang dapat dikemukakan saran:

1. Agar pengelolaan keuangan sekolah dapat ditingkatkan menjadi sangat akuntabel dan sangat transparan untuk pendidikan yang lebih baik.
2. Untuk sekolah-sekolah yang beberapa item pengukuran akuntabilitasnya belum akuntabel dan belum transparan, diperlukan perhatian khusus guna peningkatan yang lebih baik dalam menunjang pengelolaan keuangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, 2002.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi dan Pengendalian, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Editor Abdul Halim. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Harjono, Y (2007). *Kepsek Bukan Lagi 'Penguasa' Tunggal*. [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 2 Oktober 2007
- Jackson, P.M. (1982). *The Political Economy of Bureaucrazy*. Oxford : Philip Allan Publishers Limited.
- Jogiyanto, H.M, Prof., Dr., M.B.A., Akt (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Komisi Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo, (2003). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mulgan, R (1997). *The Processes of Public Accountability*. Australian Journal of Public Administration 56 (1) pp.25-36.
- Parwita, Diyah Desi. (2008). *Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan SMP Negeri di Kabupaten Bayumas*. Karya Akhir Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Purnomo, S.H., (2005). *Mandulnya Komite Sekolah*, [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), 22 Juli 2005
- Santosa. (2005). *Partisipasi Pembiayaan dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan (Studi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Bayumas*. Thesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Shciavo-Campo, S., and Tomasi, Daniel. (1999). *Managing Government Expenditure*. Asia Development Bank, Manila.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabel, Bandung. 2003.
- Sunaryanto, A. (2007). *Wajib Belajar Tak Sekedar Angka Partisipasi*. [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), 8 Maret 2007.